

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era modern dan globalisasi ini telah banyak permasalahan yang terjadi di berbagai negara, seperti masalah terhadap perempuan dan kekerasan seksual pada anak. Berkaitan tentang masalah. terhadap perempuan, peran kaum perempuan bukan hanya sebagai pendamping laki-laki atau hanya mengurus rumah tangga saja. Kaum perempuan juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan mengembangkan karirnya. Banyak perempuan yang telah mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan juga negara, namun tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya. Kondisi tersebut tidak hanya menutup partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan sering kali terjadi pada banyak bidang seperti politik, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Situasi yang dialami oleh perempuan tersebut terus berlangsung selama tidak ada upaya untuk mengubahnya. Banyak orang hingga institusi internasional seperti PBB, menginginkan dan mengupayakan adanya kesetaraan gender yang mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang (KemenPPPA, 2017). Banyak negara telah berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk negara Australia. Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, dikeluarkanlah salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Australia untuk memberdayakan dan mendukung perempuan , yaitu dengan menerapkan kebijakan cuti berbayar bagi para orang tua, cuti orang tua ini sering disebut juga sebagai cuti hamil (Papa, 2023), dengan Cuti Orangtua dengan adanya kebijakan ini diharapkan berpotensi untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja dengan mendukung perempuan untuk tetap terikat pada pekerjaannya. Pengenalan skema *Paid Parental Leave* pertama yang didanai pemerintah Australia pada tahun 2010 ini merupakan

suatu hal yang dibangun sebagai “Langkah pertama” untuk diperbaiki oleh pemerintah dan dilengkapi oleh pemberi kerja untuk memberikan hasil terbaik bagi perempuan, laki-laki dan juga anak-anak (*Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014*). Cuti orangtua ini juga sebagai perbaikan pada keterikatan perempuan dengan pasar tenaga kerja dan keamanan finansial yang lebih besar setelah kelahiran seorang anak bagi banyak Perempuan, serta kesehatan ibu dan anak yang sangat berharga. Dan dengan adanya skema ini, dapat mempertahankan staf yang berharga juga terampil dengan tetap mendorong mereka untuk tetap terhubung dengan tempat dimana mereka kerja berbayar ini juga bertujuan untuk memperkuat ikatan antara ayah dan anak dan juga membantu mengurangi kesenjangan upah yang dihadapi perempuan setelah mengambil cuti melahirkan (*Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014*).

Selanjutnya, tindak kekerasan seksual selalu bisa terjadi kepada siapapun, baik itu terhadap laki-laki atau perempuan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Banyak anak – anak yang rentan dan juga berisiko terkena bahaya atau dieksploitasi. Anak-anak tak selalu memiliki suara. Secara global, banyak anak yang telah mengalami mengalami eksploitasi dan kekerasan di setiap tahun, termasuk melalui kekerasan fisik, kerja paksa, seksual dan emosional karena anak – anak mudah untuk percaya. Orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan dapat mengambil kesempatan dari posisi mereka, baik itu guru, pemimpin/pemuka agama, anggota masyarakat dan anggota kepolisian yang dapat membahayakan anak – anak. Mungkin bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang anak untuk melawan juga mengatakan ‘jangan sakiti saya’. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Maka dari itu anak-anak berhak untuk dilindungi, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai,

termasuk negara. Perlindungan anak adalah suatu komponen penting dari praktik pembangunan yang bertanggung jawab dan konstruktif. Kita tak dapat berkontribusi terhadap masa depan yang lebih baik untuk semua jika di saat yang sama kita merusak generasi yang akan menjadi pewaris dari masyarakat, organisasi dan budaya di mana kita beroperasi. Dalam kaitannya dengan ini, perlindungan anak merupakan tanggung jawab, karena ini adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Perlindungan anak adalah hak asasi manusia, yang diabadikan dalam Konvensi PBB tentang hak anak yang telah ditandatangani oleh banyak negara (*Australian Human Rights Commission, n.d.*), termasuk negara Australia. Sebagai sebuah negara, Australia tentu harus memberikan hak – hak dan juga menjamin perlindungan terhadap anak di negaranya. Salah satu bentuknya adalah dengan didirikannya *The Royal Commission into Institutional Responses Sexual to Child Abuse. The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*, didirikan sebagai tanggapan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak yang telah muncul di Australia selama bertahun-tahun. Perdana Menteri saat itu Julia Gillard , mengumumkan keputusan untuk membentuk *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* pada 12 November 2012. Badan ini juga bertugas membuat rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi dampak pelecehan seksual terhadap anak di masa lalu dan masa depan di Australia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan satu masalah, yaitu : “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Australia Pada Masa Perdana Menteri Julia Gillard Untuk Mendukung Hak Perempuan dan Perlindungan Anak di Australia? “.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Strategic Gender Needs

Kepentingan Perempuan menurut Maxine Molyneux, dibedakan menjadi dua yaitu, antara kepentingan perempuan (*womens interest*) juga kepentingan gender (*gender interest*). Konsep kepentingan perempuan (*women;s interest*) mengasumsikan kesesuaian kepentingan yang didasarkan pada kesamaan biologis. Namun , faktanya posisi perempuan di masyarakat bergantung pada berbagai kriteria yang berbeda-beda seperti kelas, etnik,

agama, partai dan lain-lain sehingga konsekuensinya kepentingan mereka juga ditentukan oleh posisi kelas, identitas etnik, agama atau partai politik yang diikutinya. Dalam konteks perencanaan, kepentingan perempuan (*women's needs*) juga bervariasi, bergantung pada kelas, etnik, agama, partai politik maupun konteks sosial ekonomi yang sedang berlangsung sehingga kepentingan perempuan dapat berbeda-beda. Dikatakan oleh Molyneux, bahwa kepentingan gender (*gender interest*) ialah apa-apa yang bisa dikembangkan perempuan maupun laki-laki yang sehubungan dengan posisi sosialnya melalui atribut gender (Nur Azizah, 2017). Maka itu dapat dibedakan antara kepentingan gender yang strategis dan juga kepentingan gender yang praktis. Dalam konteks perencanaan kebijakan, maka kepentingan itu diubah menjadi kebutuhan (*needs*) sehingga diperoleh konsep kebutuhan gender yang strategis (*strategic gender needs*) dan juga kebutuhan gender yang praktis atau yang dikenal juga dengan *practical gender needs*.

Kebutuhan gender praktis (*Practical Gender Needs*) adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berhubungan dengan perbaikan kondisi perempuan dan laki-laki untuk menjalankan peran-peran sosial masing-masing serta untuk kelangsungan hidup mereka, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, penyediaan air bersih, penyediaan lapangan kerja dan sebagainya. Kebutuhan gender praktis ini mengarah pada tanggung jawab utama perempuan tidak hanya pada pekerjaan rumah tangga yang melibatkan pengasuhan anak, penyediaan makanan dan kesehatan, tetapi juga pengelolaan perumahan dan dasar layanan, serta kapasitas untuk memperoleh penghasilan melalui kerja produktif. Kebutuhan gender praktis apabila tidak terpenuhi, maka menyebabkan ketidaksetaraan. Kebutuhan gender praktis seperti makanan, tempat tinggal, dan air dibutuhkan oleh semua keluarga, Pengurangan beban perempuan untuk menanggung pekerjaan domestik dan merawat anak khususnya anak-anak sehingga perempuan juga ikut turut berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, tidak semua tindakan dilakukan oleh perempuan seperti tindakan mengangkat dan melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh air untuk keluarga mereka yang harus dilakukan oleh laki-laki (Moser, 2019). Kebutuhan gender strategis (*Strategic Gender Needs*) adalah kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan laki-laki, seperti dengan

adanya kesetaraan hak politik, perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, Pengurangan beban perempuan untuk menanggung pekerjaan domestik dan merawat anak , Dihilangkannya sistem pembagian kerja berdasarkan sex, serta adanya jaminan bahwa laki-laki tidak akan mengontrol perempuan dan melakukan kekerasan terhadap perempuan (Nur Azizah, 2017)

Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya (Esariti, 2016). Penulis disini akan lebih berfokus membahas mengenai *strategic gender needs*. Terpilihnya Jullia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia pada tahun 2010 telah menciptakan momentum bagi representasi perempuan untuk mendukung hak Perempuan dan perlindungan anak di Australia. Dengan menggunakan konsep *strategic gender needs*, penulis menganalisis bahwa konsep tersebut dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Australia pada masa Perdana Menteri Jullia Gillard untuk mendukung hak perempuan dan anak di Australia dengan cara mengeluarkan kebijakan atau yang dikenal dengan *National Paid Parental Leave* atau yang dikenal dengan Skema Cuti Orang Tua Berbayar Nasional dan juga membentuk *Royal Comimison into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* (Komisi Kerajaan terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak).

2. Kepemimpinan Politik

Istilah kepemimpinan dalam kepemimpinan politik merupakan seseorang yang memimpin atau disebut aktor dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mempergunakan segala atribut yang melekat dengannya. yaitu dengan cara mengatur, mengarahkan, mengorganisir juga dengan mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Kemudian, sebutan politik dalam hal kepemimpinan menunjukkan kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga – lembaga pemerintahan), juga yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik serta organisasi kemasyarakatan).

Kepemimpinan politik menurut Andrew Heywood dapat dibagi juga diketahui dalam tiga perspektif yaitu kepemimpinan sebagai pola perilaku, kepemimpinan sebagai kualitas personal, kepemimpinan sebagai nilai politik (Alfian, 2009). Lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1) Kepemimpinan sebagai pola perilaku politik

Inti dari kepemimpinan politik ialah pengaruh, suatu kepemimpinan yang terkait dengan kemampuan seorang aktor politik untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain dalam mencapai dan mengusahakan tujuan yang di harapkan. Pengaruh (*influence*) adalah konsep strategi dalam kepemimpinan khususnya di dalam kepemimpinan politik. Derajat kepemimpinan seorang pejabat politik antara lain dapat dilihat melalui cara, bagaimana dirinya mampu mempengaruhi yang dia pimpin, dan pemimpin yang gagal mengembangkan pengaruh, otomatis gagal dalam memimpin.

2) Kepemimpinan sebagai kualitas personal

Kepemimpinan sebagai kualitas personal yang dimaksud disini ialah merupakan suatu kepemimpinan yang berkenaan dengan kharisma seorang pemimpin (aktor politik). Pemimpin politik yang berkharisma dapat disebut sebagai pemimpin yang mempunyai kelebihan, yaitu memiliki sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan serta tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin orang dapat mengagumi dan bisa menghormati dan membesarkan pemimpin tersebut serta bersedia melakukan sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan oleh sang pemimpin. Pemimpin disini dianggap istimewa karena sifat-sifat juga kepribadiannya yang mengagumkan serta berwibawa. Kepribadian seorang pemimpin bisa diterima juga dipercayai sebagai orang yang dihormati, disegani, dan dipatuhi secara ikhlas dan rela.

3) Kepemimpinan sebagai nilai politik

Kepemimpinan sebagai nilai politik merupakan kepemimpinan yang memiliki kaitan dengan kemampuan aktor politik untuk menggerakkan orang lain yaitu dengan otoritas yang dia miliki.

Selanjutnya Prof. Dr. Sondang P. Siagian mengutarakan pengertian mengenai kepemimpinan politik, bahwa, "Kepemimpinan politik merupakan inti dari pada sistem politik karena kepemimpinan adalah motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat – alat lainnya dalam organisasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain dengan strategi politiknya" (Siagian).

Kepemimpinan politik adalah suatu hal yang pokok di dalam sistem politik, kerja sama dalam dan untuk mencapai suatu tujuan. Kualitas dari seorang pemimpin politik sangat menentukan keberhasilan lembaga atau organisasi, dan dapat mempengaruhi orang lain, serta menentukan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan dengan bersama-sama. Kepemimpinan politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mencapai suatu tujuan sehingga dapat disebut bahwa sukses ataupun gagalnya yang dialami sebagian besar pemimpin politik itu benar-benar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Dalam hal ini menimbulkan beberapa pengertian yang terkandung dalam kepemimpinan politik Peter G. Northouse, menyatakan bahwa : kepemimpinan politik itu menyangkut hal kepemimpinan sebagai sebuah proses, dalam kepemimpinan politik ada pengaruh, konteks kepemimpinan politik adalah kelompok, ada unsur pencapaian tujuan. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa kepemimpinan politik ialah suatu proses yang dimana seseorang mempunyai pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan individu lain dalam mencapai tujuan bersama, dengan demikian bukan hanya orang yang memiliki sifat utama kepemimpinan (potensi yang ada pada dirinya), tetapi juga mampu untuk mengaktualisasikannya.

Dalam suatu lingkungan birokrasi, bawahan memiliki peranan yang sangat strategis, karena sukses atau tidaknya seseorang perihal kepemimpinan politik bergantung kepada peranan mesin birokrasi secara efektif. Adapun situasi dan kondisi

sosial ialah merupakan suatu keadaan dimana seorang pemimpin politik berusaha pada saat – saat tertentu mempengaruhi juga mengambil keputusan dalam rangka mencapai kehendak umum. Melalui kepemimpinan, seorang pemimpin politik bisa menjalankan agenda politiknya. Pemimpin politik biasanya menggunakan hubungan – hubungan formal dan juga personal dalam menggerakkan bawahan serta masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan politik merupakan suatu hal yang pokok dalam sistem politik, kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Naiknya Julia Gillard ke tampuk pemerintahan tertinggi di Australia pada tahun 2010 telah menciptakan momentum bagi representasi perempuan dalam institusi politik di Australia secara lebih serius. Menyandang status sebagai Perdana Menteri perempuan pertama Australia, Gillard memiliki *power* dalam statusnya tersebut untuk mendukung hak – hak politik perempuan di Australia. Walaupun Australia termasuk negara pelopor hak – hak perempuan, namun pada kenyataannya, Australia masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan negara – negara demokrasi lainnya dalam merealisasikan hak – hak perempuan secara nyata.

Sebagai sosok perempuan yang berada di lingkungan politik yang di dominasi oleh kaum laki – laki, membuat Julia Gillard berupaya keras untuk mendukung hak perempuan dan perlindungan anak di Australia. Dengan *power*, kualitas, dan jabatan yang dimilikinya mampu untuk mendukung upaya tersebut misalnya mengembangkan kebijakan yang mendukung hak perempuan yaitu *National Paid Parental Leave*, serta perlindungan terhadap anak melalui pembentukan *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*. Tak hanya sebagai seorang Perdana Menteri, sebelumnya Julia Gillard juga pernah menempati jabatan strategis pemerintahan Australia seperti, Wakil Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua dari partai *Australian Labor Party* (ALP). Maka dari itu, sebagai seorang Perdana Menteri perempuan pertama Australia, Julia Gillard dengan kualitas, pengalaman, jabatan, dan *power* yang dimiliki, Julia Gillard dapat mendukung hak perempuan Australia dan perlindungan anak di lingkungan masyarakat dan pemerintahan Australia.

D. Hipotesa

Dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian di dukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut :

Pemerintah Australia pada masa Perdana Menteri Julia Gillard mendukung hak perempuan melalui kebijakan *National Paid Parental Leave* atau Skema Cuti Orang Tua Berbayar Nasional dan Perdana Menteri Julia Gillard juga mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Komisi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak atau *The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan Pemerintah Australia pada masa Perdana Menteri Jullia Gillard untuk mendukung hak perempuan melalui kebijakan Skema Cuti Orang Tua Berbayar Nasional atau yang dikenal dengan *National Paid Parental Leave*, dan juga kebijakan untuk membentuk Komisi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak atau *The Royal Commission Into Institutional Responses To Child Sexual Abuse*.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Australia pada masa Perdana Menteri Julia Gillard untuk mendukung hak perempuan dan Perlindungan anak di Australia melalui Skema Cuti Orang Tua Berbayar Nasional dan Komisi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak ini akan berfokus dari sejak terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia yaitu pada tahun 2010 sampai saat keluarnya laporan akhir dari Komisi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di tahun 2017.

G. Metodologi Penelitian

a) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian yang diterbitkan oleh Ristekdikti pada tahun 2019 menjelaskan, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset

yang memanfaatkan data deskriptif, yang mana itu berupa kata – kata tertulis ataupun lisan dari orang – orang dan pelaku yang dapat diamati. Landasan teori digunakan agar dapat sesuai dengan fakta di lapangan.

b) Teknik Pengambilan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah studi pustaka (*library research*), dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya : buku, jurnal, majalah, koran, dan artikel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab – bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam empat bab, dengan perincian masing – masing bab sebagai berikut :

BAB I : Berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi mengenai terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia, hak cuti sebelum adanya Skema Cuti Orang Tua Berbayar, dan perlindungan anak di Australia

BAB III : Berisi tentang penjelasan Kebijakan Pemerintah Australia Untuk Mendukung Hak Perempuan dan Anak Pada Masa Perdana Menteri Julia Gillard, yaitu *The National Paid Parental Leave* dan *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*.

BAB IV : Penulis akan menuliskan kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan dari BAB I sampai BAB III sekaligus menjadi bagian akhir penulisan skripsi.

